**BAB II**

**KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

* 1. **Kajian Pustaka**

**2.1.1. Kinerja Keuangan**

**2.1.1.1. Pengertian Kinerja Keuangan**

Untuk memutuskan suatu badan usaha atau perusahaan memiliki kualitas yang baik maka ada dua penilaian yang paling dominan yang dapat dijadikan acuan untuk melihat badan usaha/perusahaan tersebut telah menjalankan suatu kaidah-kaidah manajemen yang baik. Penilaian ini dapat dilakukan dengan melihat sisi kinerja keuangan (*financial performance*) dan kinaerja non keuangan (*non financial performance*). Kinerja keuangan melihat pada laporan keuangan yang dimiliki oleh perusahaan yng bersangkutan dan itu tercermin dari informasi yang diperoleh pada *balance sheet* (neraca), *income statement* (laporan laba rugi), dan *cash flow* (laporan arus kas) serta hal-hal lain yang turut mendukung sebagai penguat penilaian performance tersebut.

Definisi kinerja keuangan menurut Irham Fahmi (2011:239), adalah

“Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan mengunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Seperti dengan membuat laporan keuangan yang telah memenuhi standard dan ketentuan dalam SAK (Standar Akuntansi Keuangan) atau GAAP (*General Acepted Accounting Principle*), dan lainnya.”

Dari definisi tesebut, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan adalah prestasi yang dicapai oleh perusahaan dalam bidang keuangan sebagaimana disajikan dalam laporan keuangan.

**2.1.1.2.**  **Analisis Kinerja Keuangan Melalui Laporan Keuangan**

Laporan keuangan merupakan informasi keuangan yang menggambarkan kinerja keuangan suatu perusahaan. Menurut Irham Fahmi (2014:22-23), fokus utama dalam pelaporan keuangana adalah informasi mengenai kinerja perusahaan yang tersedia dengan mengukurlaba (*earning*) dan komponennya. Investor, kreditor dan pengguna pelaporan keuangan lainnya yang ingin menilai prospek net cash inflow perusahaan, ini menjadi bagian yang penting untuk didiskusikan. Laporan keuangan yang hanya menunjukkan penerimaan dan pembayaran kas pada periode yang pendek tidak cukup mampu untuk menunjukkan kesuksesan kinerja suatu perusahaan (SFAC No.1 Par 43).

Penilaian kinerja suatu perusahaan dapat dilakukan dengan berbagai metode analisis, menurut Weygandt, Kieso dan Kimmel (201.1:389), tiga cara umum untuk mengevaluasi pentingnta data laporan keuangan adalah:

1. Analisis Horizontal, mengevaluasi serangkaian data laporan keuangan selama periode waktu tertentu.
2. Analisis Vertikal, mengevaluasi data laporan keuangan dengan menyatakan setiap pos dalam laporan keuangan sebagai presentase dari jumlah yang akan menjadi dasar.
3. Analisis Rasio, menyatakan hubungan diantara pos-pos yang dipilih dari data laporan keuangan.

Analisis dan interprestasi terhadap laporan keuangan sangat bermanfaat dan menjadi keharusan bagi setiap perusahaan untuk mengetahui keadaan dan perkembangan dari perusahaan yang bersangkutan bagi pimpinan atau manajer perusahaan.Melaui analisis ini, dapat diketahui kelemahan-kelamahan dan kekuatan-kekuatan perusahaan untuk meningkatkan kinerjanya pada periode berikut.

Sehubungan dengan itu maka pimpinan perusahaan dapat mengadakan perbaikan-perbaikan, penyusunan rencana dan kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan pada masa yang akan datang dan juga untuk dapat mempertahankan bahkan meningkatkan hasil-hasil yang telah dicapai pada periode sebelumnya.

**2.1.2. Laporan Keuangan**

**2.1.2.1 Pengertian Laporan Keuangan**

Laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu. Jenis laporan keuangan yang lazim dikenal adalah laporan neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan posisi keuangan atau laporan perubahan modal.

Bagi para penganalisis, laporan keuangan merupakan media yang paling penting untuk menilai prestasi dan kondisi ekonomis suatu perusahaan. Pada tahap pertama seorang analisis tidak akan mampu melakukan pengamatan langsung ke suatu perusahaan. Dan seandainya dilakukan, ia pun tidak akan dapat mengetahui banyak tentang situasi perusahaan. Oleh karena itu, media yang paling penting adalah laporan keuangan. Laporan keuangan inilah yang menjadi bahan sarana informasi *(screen)* bagi analisis dalam proses pengambilan keputusan.

Pengertian laporan keuangan menurut Ikatan Akuntansi Indonesia melalui Standar Akuntansi Keuangan (2012:2) tentang Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

“Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara misalnya, sebagai laporan arus kas atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Disamping itu juga termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya, informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga.”

Sedangkan pengertian laporan keuangan menurut Kieso, Weygandt dan Warfield (2011:5), laporan keuangan adalah:

*“Financial statement are the principal means through which a company communicates it’s financial information to those outside it. The statement provide a company’s history quantified in money terms. The financial statement most frequently provided are (1) the statement of financial statement, (2) the income statement or statement of comprehensive income, (3) the statement of cash flows, and (4) integral part of each financial statement.”*

Menurut Walter T. Horrison Jr., Charles T. Horngren, C. William Thomas dan Themin Suwardy (2011:2), laporan keuangan (*financial statements*) adalah dokumen bisnis yang digunakan perusahaan untuk melaporkan hasil aktivitas kepada berbagai kelompok pemakai, yang dapat meliputi manajer, investor, kreditor dan agen regulator. Sebaliknya, pihak-pihak tersebut menggunakan informasi yang dilaporkan untuk membuat berbagai keputusan, seperti dalam melakukan investasi atau meminjamkan uang kepada perusahaan.

Melalui penjelasan mengenai definisi laporan keuangan di atas dapat diketahui bahwa laporan keuangan merupakan gambaran posisi keuangan suatau perusahaan yang menyajikan informasi yang akan digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan baik pihak dari dalam perusahaan itu sendri maupun pihak di luar perusahaan dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat.

**2.1.2.2. Tujuan Laporan Keuangan**

Penyusunan laporan keuangan ditujukan untuk mengetahui secarajelas bagaimana posisi keuangan dari suatu kegiatan usaha yang telah dijalankan entitas. Hasil dari laporan keuangan juga dapat digunakan sebagai dasar didalam pengambilan keputusan atau kebijakan usaha. Tujuan Laporan Keuangan menurut Donal E. Kieso (2011:7) adalah:

*“The objective of general purpose financial reporting is to provide financial information about the reporting entity that is usefull to present and potential equity investors, lenders, and other creditors in making decisions in their capacity as capital providers.”*

Sedangkan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan-Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (2009: 2) tujuan laporan keuangan adalah:

“Menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tambahan. Dalam memenuhi tujuannya, laporan keuangan juga menunjukan apa telah dilakukan manajemen (stewardship) atau pertanggung jawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya”.

Laporan keuangan disusun dengan tujuan untuk memberikan informasi terkait dengan posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan suatu entitas yang berguna untuk pengambilan keputusan para pemakainya. Keputusan yang diambil oleh para pemakai laporan keuangan sangat bervariasi, tergantung kepentingan mereka. Informasi keuangan yang ada pada laporan keuangan harus memiliki karakteristik tertentu agar dapat memenuhi kebutuhan pemakainya. Karakteristik yang harus dipenuhi suatu informasi yang ada pada laporan keuangan ditetapkan dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan atau *IFRS Framework*. (Purba, 2010:27).

**2.1.2.3. Komponan Laporan Keuangan**

Laporan keuangan perusahaan terdiri dari beberapa jenis yang menyatakan tentang kegiatan perusahaan. Jenis-jenis tersebut akan menyatakan tentang kondisi dari perusahaan tersebut. Menurut Kieso dan Weygandt, (2007 : 5) yang dialih bahasakan oleh Herman Wibowo menyebutkan tentang jenis-jenis laporan keuangan adalah sebagai berikut :

“Laporan keuangan yang sering disajikan adalah neraca, laporan laba/rugi, laporan arus kas, laporan ekuitas pemilik atau pemegang saham.”

Maka teori diatas menjabarkan jenis-jenis laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan modal atau laba ditahan, dimana setiap laporan memiliki fungsi yang berbeda-beda namun memiliki keterkaitan satu sama lain. Mengacu pada Weygandt, Kieso, dan Kimmel (2011:21-24), laporan keuangan terdiri dari:

1. Laporan Laba Rugi.

Laporan laba rugi merupakan laporan keuangan yang menyajikan pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan, beban yang ditimbulkan akibat adanya kegiatan operasional perusahaan, serta laba atau rugi yang didapatkan oleh perusahaan selama satu periode. Laporan laba rugi melaporkan kesuksesan dan keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan diakhir periode operasi perusahaan yang bersangkutan.

1. Laporan Ekuitas Pemilik.

Laporan ekuitas pemilik merupakan laporan yang menyajikan perubahan yang terjadi pada ekuitas pemilik, apakah terjadi kenaikan atau penurunan dari ekuitas yang dimiliki pemilik selama satu periode.

1. Neraca.

Neraca merupakan laporan keuangan yang berisikan informasi mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik dari suatu perusahaan dalam satu periode.

1. Laporan Arus Kas.

Laporan arus kas merupakan laporan keuangan yang berisikan informasi mengenai arus kas masuk dan arus kas keluar yang terjadi dalam suatu perusahaan dalam satu periode. Laporan arus kas melaporkan efek kas dari kegiatan operasi perusahaan selama satu periode, transaksi atas investasi, transaksi pendanaan, kenaikan atau penurunan kas bersih selama satu periode, dan juga melaporkan jumlah kas yang ada pada perusahaan setelah akhir periode yang bersangkutan.

Karena proses laporan keuangan tersebut saling berkaitan maka ketelitian dan kehati-hatian sangat diperlukan, tanpa ada kehati-hatian yang mendalam hasil yang diperoleh tidak akan mencapai apa yang diharapan.

**2.1.2.4. Keterbatasan Laporan Keuangan**

Laporan keuangan dipersiapkan atau disusun dengan maksud untuk memberikan gambaran atau laporan kemajuan *(progress report)* secara periodik yang dilakukan oleh manajemen dalam perusahaan. adapun bentuk kelemahan atau keterbatasan dari laporan keuangan bila dilihat dari pendapat Prinsip Akuntansi Indonesia menurut Sofyan Syafri Harahap (2008:247) adalah:

* 1. Laporan keuangan bersifat historis, yaitu merupakan laporan atas kejadian yang telah lewat. Karenanya, laporan keuanga tidak dapat dianggap sebagai satu-satunya sumber informasi dalam proses pengambilan keputusan ekonomi.
  2. Laporan keuangan bersifat umum dan bukan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pihak tertentu,
  3. Proses penyusunan laporan keuangan tidak luput dari penggunaan taksiran dan berbagai pertimbangan.
  4. Akuntansi hanya melaporkan informasi yang material demikian pula penerapan prinsip akuntansi terhadap suatu fakta atau pos tertentu mungkin tidak dilaksanakan jika hal itu tidak menimbulkan pengaruh yang material terhadap kelayakan laporan keuangan.
  5. Laporan keuangan bersifat konservatif dalam menghadapi ketidakpastian; bila terdapat beberapa kemungkinan kesimpulan yang tidak pasti mengenai penilaian suatu pos, lazimnya dipilih alternatif yang menghassilkan laba bersih atau nilai aktiva yang paling kecil.
  6. Laporan keuangan lebih menekankan kepada makna ekonomis suatu peristiwa/transaksi daripada bentuk hukumnya (formalitas) (*substance over form*).
  7. Laporan keuangan disusun dengan istilah-istilah teknis dan pemakai laporan keuangan diasumsikan memahami bahasa teknis akuntansi dan sifat dari informasi yang dilaporkan.
  8. Adanya berbagai alternative metode akuntansi yang dapat digunakan menimbulkan variasi dalam pengukuran sumber-sumber ekonomis dan tingkat kesuksesan antar perusahaan.
  9. Informasi yang bersifat kualitatif dan fakta yang tidak dapat dikuantifikasikan umumnya diabaikan.

Dengan memahami sifat dan keterbatasan yang terdapat dalam suatu laporan keuangan, maka pengguna informasi dalam laporan keuangan dapat menjaga kemungkinan salah tafsir terhadap informasi yang diberikan, sehingga keputusan yang diambil dapat lebih akurat.

* + 1. **Analisis Rasio Keuangan**

Untuk menilai kondisi keuangan dan prestasi perusahaan, analisis laporan keuangan memerlukan beberapa tolak ukur.Tolak ukur yang sering digunakan adalah rasio atau indeks yang menghubung` kan dua data keuangan yang satu dengan yang lainnya. Analisis dan interpretasi dari macam-macam rasio dapat memberikan pandangan yang lebih baik tentang kondisi keuangan dan prestasi perusahaan.

Rasio keuangan ini hanya menyederhanakan informasi yang menggambarkan hubungan antara pos tertentu dengan pos lainnya. Dengan penyederhanaan ini kita dapat menilai secara cepat hubungan antara pos-pos tersebut dan dapat membandingkannya dengan rasio lain sehingga kita dapat memperoleh informasi dan memberikan penilaian (Harahap, 2011:297).

Analisis rasio seperti halnya alat-alat analisa yang lain adalah *“future oriented”.* Oleh karena itu, penganalisa harus mampu untuk menyesuaikan faktor-faktor yang ada pada periode atau waktu ini dengan faktor-faktor di masa yang akan datang yang mungkin akan mempengaruhi posisi keuangan atau hasil operasi perusahaan yang bersangkutan. Dengan demikian kegunaan atau manfaat suatu angka rasio sepenuhnya tergantung kepada kemampuan atau kecerdasan penganalisa dalam menginterpretasikan data yang bersangkutan.

* + - 1. **Jenis Rasio Keuangan**

Analisis laporan keuangan penting dilakukan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan suatu perusahaan. Informasi ini diperlukan untuk mengevaluasi kinerjaa yang dicapai oleh manajemen perusahaan di masa yang lalu, dan juga untuk bahan pertimbangan menyusun rencana perusahaan ke depan. Salah satu cara untuk memperoleh informasi yang bermanfaat dari laporan keuangan perusahaan adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan. Rasio keuangan di desain untuk memperlihatkan hubungan antara item-item pada laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi). Berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-100/MBU/2002, rasio yang digunakan untuk menilai tingkat kesehatan BUMN adalah:

1. Imbalan kepada pemegang saham/*Return on Equity* (ROE)

Rumus:

x 100%

Keterangan:

1. Laba setelah Pajak adalah Laba setelah Pajak dikurangi dengan laba hasil penjualan dari :

* Aktiva tetap
* Aktiva Non Produktif
* Aktiva Lain-lain
* Saham Penyertaan Langsung.

1. Modal Sendiri adalah seluruh komponen Modal Sendiri dalam neraca perusahaan pada posisi akhir tahun buku dikurangi dengan komponen Modal sendiri yang digunakan untuk membiayai Aktiva Tetap dalam Pelaksanaan dan laba tahun berjalan. Dalam Modal sendiri tersebut di atas termasuk komponen kewajiban yang belum ditetapkan statusnya.
2. Aktiva Tetap dalam pelaksanaan adalah posisi pada akhir tahun buku Aktiva Tetap yang sedang dalam tahap pembangunan.

**Tabel 2.1**

**Daftar skor penilaian ROE**

|  |  |
| --- | --- |
| **ROE (%)** | **Skor** |
| 15 < ROE | 15 |
| 13 < ROE <= 15 | 13,5 |
| 11 < ROE <= 13 | 12 |
| 9 < ROE <= 11 | 10,5 |
| 7,9 < ROE <= 9 | 9 |
| 6,6 <ROE <= 7,9 | 7,5 |
| 5,3 < ROE <= 6,9 | 6 |
| 4 < ROE <= 5,3 | 5 |
| 2,5 < ROE <= 4 | 4 |
| 1 < ROE <= 2,5 | 3 |
| 0 < ROE <= 1 | 1,5 |
| ROE < 0 | 1 |

1. Imbalan Investasi/*Return On Investmen* (ROI)

Rumus:

x 100%

Keterangan:

1. EBIT adalah laba sebelum bunga dan pajak dikurangi laba dari hasil penjualan dari :

* Aktiva Tetap
* Aktiva lain-lain
* Aktiva Non Produktif
* Saham penyertaan langsung

1. Penyusutan adalah Depresiasi, Amortisasi dan Deplesi
2. *Capital Employed* adalah posisi pada akhir tahun buku Total Aktiva dikurangi Aktiva Tetap dalam pelaksanaan.

**Tabel 2.2**

**Daftar skor penilaian ROI**

|  |  |
| --- | --- |
| **ROI (%)** | **Skor** |
| 18 < ROI | 10 |
| 15 < ROI <= 18 | 9 |
| 13 < ROI <= 15 | 8 |
| 12 < ROI <= 13 | 7 |
| 10,5 < ROI <= 12 | 6 |
| 9 < ROI <= 10,5 | 5 |
| 7 < ROI <= 9 | 4 |
| 5 < ROI <= 7 | 3,5 |
| 3 < ROI <= 5 | 3 |
| 1 < ROI <= 3 | 2,5 |
| 0 < ROI <= 1 | 2 |
| ROI < 0 | 0 |

1. Rasio Kas/*Cash Ratio*

Rumus:

x 100%

Keterangan:

1. Kas, Bank dan surat Berharga Jangka Pendek adalah posisi masing-masing pada akhir tahun buku
2. Current Liabilities adalah posisi seluruh kewajiban Lancar pada akhir tahun buku.

**Tabel 2.3**

**Daftar skor penilaian *Cash Ratio***

|  |  |
| --- | --- |
| **Cash Ratio = x**  **(%)** | **Skor** |
| x >= 35 | 3 |
| 25 <= x < 35 | 2,5 |
| 15 <= x < 25 | 2 |
| 10 <= x < 15 | 1,5 |
| 5 <= x < 10 | 1 |
| 0 <= x < 5 | 0 |

1. Rasio Lancar/*Current Ratio*

Rumus:

x 100%

Keterangan:

1. *Current Asset* adalah posisi Total Aktiva Lancar pada akhir tahun buku
2. *Current Liabilities* adalah posisi Total Kewajiban Lancar pada akhir tahun buku .

**Tabel 2.4**

**Daftar skor penilaian *Current Ratio***

|  |  |
| --- | --- |
| **Current Ratio = x**  **(%)** | **Skor** |
| 125 <= x | 3 |
| 110 <= x < 125 | 2,5 |
| 100 <= x < 110 | 2 |
| 95 <= x < 100 | 1,5 |
| 90 <= x < 95 | 1 |
| x < 90 | 0 |

1. *Collection Periods* (CP)

Rumus:

x 365 hari

Keterangan:

1. Total Piutang Usaha adalah posisi Piutang Usaha setelah dikurangi Cadangan Penyisihan Piutang pada akhir tahun buku.
2. Total Pendapatan Usaha adalah jumlah Pendapatan Usaha selama tahun buku.

**Tabel 2.5**

**Daftar Skor Penilaian *Collection Periods***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CP=x**  **(hari)** | **Perbaikan=x**  **(hari)** | **Skor** |
| x <= 60 | x > 35 | 4 |
| 60 < x <= 90 | 30 < x <=35 | 3,5 |
| 90 < x <= 120 | 25 < x <=30 | 3 |
| 120 < x <= 150 | 20 < x <=25 | 2,5 |
| 150 < x <= 180 | 15 < x <=20 | 2 |
| 180 < x <= 210 | 10 < x <=15 | 1,6 |
| 210 < x <= 240 | 6 < x <=10 | 1,2 |
| 240 < x <= 270 | 3 < x <= 6 | 0,8 |
| 270 < x <= 300 | 1 < x <= 3 | 0,4 |
| 300< x | 0 < x <=1 | 0 |

1. Perputaran Persediaan (PP)

Rumus:

x 365 hari

Keterangan:

1. Total Persediaan adalah seluruh persediaan yang digunakan untuk proses produksi pada akhir tahun buku yang terdiri dari persediaan bahan baku, persediaan barang setengah jadi dan persediaan barang jadi ditambah persediaan peralatan dan suku cadang.
2. Total Pendapatan Usaha adalah Total Pendapatan Usaha dalam tahun buku yang bersangkutan.

**Tabel 2.6**

**Daftar Skor Penilaian Perputaran Persediaan**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CP=x**  **(hari)** | **Perbaikan=x**  **(hari)** | **Skor** |
| x <= 60 | x > 35 | 4 |
| 60 < x <= 90 | 30 < x <=35 | 3,5 |
| 90 < x <= 120 | 25 < x <=30 | 3 |
| 120 < x <= 150 | 20 < x <=25 | 2,5 |
| 150 < x <= 180 | 15 < x <=20 | 2 |
| 180 < x <= 210 | 10 < x <=15 | 1,6 |
| 210 < x <= 240 | 6 < x <=10 | 1,2 |
| 240 < x <= 270 | 3 < x <= 6 | 0,8 |
| 270 < x <= 300 | 1 < x <= 3 | 0,4 |
| 300< x | * + 1. < x <=1 | 0 |

1. Perputaran Total Asset/*Total Asset Turn Over (*TATO)

Rumus:

x 100%

Keterangan:

1. Total Pendapatan adalah Total Pendapatan Usaha dan Non Usaha tidak termasuk pendapatan hasil pe
2. Penjualan Aktiva Tetap
3. *Capital Employed* adalah posisi pada akhir tahun buku total Aktiva dikurangi Aktiva Tetap Dalam Pelaksanaan.

**Tabel 2.7**

**Daftar Skor penilaian TATO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TATO = x**  **(%)** | **Perbaikan = x**  **(%)** | **Skor** |
| 120 < x | 20 < x | 4 |
| 105 < x <= 120 | 15 < x <= 20 | 3,5 |
| 90 < x <= 105 | 10 < x <= 15 | 3 |
| 75 < x <= 90 | 5 < x <= 10 | 2,5 |
| 60 < x <= 75 | 0 < x <= 5 | 2 |
| 40 < x <= 60 | x <= 0 | 1,5 |
| 20 < x <= 40 | x < 0 | 1 |
| x <= 20 | x < 0 | 0,5 |

1. Rasio Total Modal Sendiri Terhadap Total Asset (TMS terhadap TA)

Rumus:

x 100%

Keterangan:

tahun buku diluar dana-dana yang belum ditetapkan statusnya.

1. Total Asset adalah Total Asset dikurangi dengan dana-dana yang belum ditetapkan statusnya pada poisisi akhir tahun buku yang bersangkutan.

**Tabel 2.8**

**Daftar Skor Penilaian TMS terhadap TA**

|  |  |
| --- | --- |
| **TMS thd TA (%) = x** | **Skor** |
| x < 0 | 0 |
| 0 < = x < 10 | 2 |
| 10 < = x < 20 | 3 |
| 20 < = x < 30 | 4 |
| 30 < = x < 40 | 6 |
| 40 < = x < 50 | 5,5 |
| 50 < = x < 60 | 5 |
| 60 < = x < 70 | 4,5 |
| 70 < = x < 80 | 4,25 |
| 80 < = x < 90 | 4 |
| 90 < = x < 100 | 3,5 |

* + - 1. **Keterbatasan Analisis Rasio Keuangan**

Menurut Indriani (2011:50), kekurangan dari informasi analisa rasio ini adalah sebagai berikut :

* 1. Rasio keuangan didasarkan pada informasi akuntansi yang dihasilkan melalui prinsip-prinsip akuntansi yang dianut perusahaan, sedangkan data tersebut dapat ditafsir dengan berbagai macam cara dan bahkan bias dimanipulasi.
  2. Rasio keuangan dapat mencerminkan suatu kondisi yang luar biasa dimasa lampau.
  3. Sulit untuk ditemukan ukuran rasio standar yang memberikan arti tidak kabur sebagai dasar perbandingan.

Menurut Irham Fahmi (2011:110-111), ada beberapa kelemahan dengan dipergunakannya analisa secara rasio keuangan, yaitu:

1. Penggunaan rasio keuangan akan memberikan pengukuran yang relatif terhadap kondisi suatu perusahaan. Analisis rasio keuangan hanyalah satu titik awal dalam analisis keuangan suatu perusahaan.
2. Analisis rasio keuangan hanya dapat dijadikan sebagai peringatan awal dan bukan kesimpulan akhir. Analisis rasio tidak memberikan banyak jawaban kecuali menyediakan rambu-rambu tentang apa yang seharusnya diharapkan.
3. Setiap data yang diperoleh yang dipergunakan dalam menganalisis adalah bersumber dari laporan keuangan perusahaan. maka sangat memugkinkan data yang diperoleh tersebut adalah data yang angka-angkanya tidak memiliki tingkat keakuratan yang tinggi, dengan alasan mungkin saja data-data tersebut diubah dan disesuaikan berdasarkan kebutuhan.
4. Pengukuran rasio keuangan banyak yang bersifat *artificial*, yang artinya perhitungan rasio keuangan tersebut dilakukan oleh manusia, dan setiap pihak memiliki pandangan yang berbeda-beda dalam menempatkan ukuran dan terutama justifikasi dipergunakannya rasio-rasio tersebut.
   * 1. **Privatisasi**
        1. **Pengertian Privatisasi**

Menurut Kepres RI No. 122 Tahun 2001, privatisasi adalah:

“Pengalihan atau penyerahan sebagian kontrol atas sebuah BUMN kepada swasta antara lain melalui cara penawaran umum, penjualan saham secara langsung kepada mitra strategis, penjualan saham perusahaan kepada karyawan, dan atau cara-cara lain yang dianggap tepat.”

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah RI No. 33 Tahun 2005, privatisasi adalah penjualan saham Persero, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat.

Menurut Kamaludin, Karona Cahya dan Berto Usman (2015:10-11) privatisasi adalah:

“Penjualan perusahaan persero baik secara sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan performa dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas kepemilikan saham oleh masyarakat.”

Berdasarkan pengertian privatisasi tersebut, maka “*vis*i” Kementrian Negara BUMN mengenai privatisasi adalah :

“Mendorong BUMN untuk meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan guna menjadi juara dalam industrinya, serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam kepemilikan sahamnya”

Dengan memperhatikan prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggung jawaban dan kewajaran.

Maksud dan tujuan yang telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tersebut sekaligus menjadi “*mis*i” Kementrian Negara BUMN mengenai proses pelaksanaan privatisasi, yaitu dengan maksud untuk:

“Memperluas kepemilikan masyarakat atas Persero, meningkatkan effisiensi dan produktivitas perusahaan, menciptakan struktur keuangan dan manajemen keuangan yang baik/kuat, menciptakan struktur industry yang sehat dan kompetitif, menciptaka Peersero yang berdaya saing dan berorientasi global, dan menumbuhkan iklim usaha, ekonomi makro dan kapasitas pasar.”

Dari berbagai definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa privatisasi merupakan pengalihan atau penyerahan sebagian maupun seluruhnya kepemilikan perusahaan pemerintah kepada swasta.

* + - 1. **Maksud dan Tujuan Privatisasi**

Pada dasarnya kebijakan privatisasi ditujukan untuk berbagai aspek harapan, dilihat dari aspek keuangan, pembenahan internal manajemen (jasa dan organisasi), ekonomi dan politik. Dari segi keuangan, privatisasi ditujukan untuk meningkatkan penghasilan pemerintah terutama berkaitan dengan tingkat perpajakan dan pengeluaran publik; mendorong keuangan swasta untuk ditempatkan dalam investasi publik dalam skema infrastruktur utama; menghapus jasa-jasa dari kontrol keuangan sektor publik. Maksud dan tujuan privatisasi menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN pasal 74, yaitu:

1. Privatisasi dilakukan dengan maksud untuk :
   1. memperluas kepemilikan masyarakat atas Persero;
   2. meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan;
   3. menciptakan struktur keuangan dan manajemen keuangan yang baik/kuat;
   4. menciptakan struktur industri yang sehat dan kompetitif;
   5. menciptakan Persero yang berdaya saing dan berorientasi global;
   6. menumbuhkan iklim usaha, ekonomi makro, dan kapasitas pasar.
2. Privatisasi dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemilikan saham Persero.
   * + 1. **Metode Privatisasi**

Menurut Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 2005, privatisasi dilakukan dengan cara:

1. Penjualan saham berdasarkan ketentuan pasar modal;
2. Penjualan saham secara langsung kepada investor;
3. Penjualan saham kepada manajemen dan/atau karyawan Persero yang bersangkutan.
   * 1. **Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN**

Berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-100/MBU/2002 adalah peraturan menteri terkait penilaian tingkat kesehatan BUMN. Peraturan menteri ini berlaku bagi seluruh BUMN nonjasa keuangan maupun BUMN jasa keuangan kecuali Persero Terbuka dan BUMN yang dibentuk dengan undang-undang tersendiri. BUMN nonjasa keuangan adalah BUMN yang bergerak di bidang infrastruktur dan noninfrastruktur. Menurut Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-100/MBU/2002 pasal 5 mengenai pengertian BUMN Infrastruktur dan BUMN Non infrastruktur adalah:

* + 1. BUMN INFRASTRUKTUR adalah BUMN yang kegiatannya menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan masyarakat luas, yang bidang usahanya meliputi :
    2. Pembangkitan, transmisi atau pendistribusian tenaga listrik.
    3. Pengadaan dan atau pengoperasian sarana pendukung pelayanan angkutan barang atau penumpang baik laut, udara atau kereta api.
    4. Jalan dan jembatan tol, dermaga, pelabuhan laut atau sungai atau danau, lapangan terbang dan bandara.
    5. Bendungan dan irigrasi.

1. Penambahan atau pengurangan bidang-bidang atau jenis-jenis kegiatan untuk menentukan kriteria BUMN INFRASTRUKTUR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara.
2. BUMN NON INFRASTRUKTUR adalah BUMN yang bidang usahanya diluar bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Di sisi lain, BUMN yang bergerak dalam bidang jasa keuangan adalah perbankan, asuransi, jasa pembiayaan, dan jasa penjaminan. Berikut indikator-indikator penilaian tingkat kesehatan BUMN non jasa keuangan yang dinilai dan masing-masing bobotnya adalah:

**Tabel 2.9**

**Daftar indikator dan aspek keuangan**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indikator** | **Bobot** | |
| **Infra** | **Non Infra** |
| 1. Imbalan kepada pemegang saham (ROE) | 15 | 20 |
| 1. Imbalan Investasi (ROI) | 10 | 15 |
| 1. Rasio Kas | 3 | 5 |
| 1. Rasio Lancar | 4 | 5 |
| 1. Colections Periods | 4 | 5 |
| 1. Perputaran Persediaan | 4 | 5 |
| 1. Perputaran total asset | 4 | 5 |
| 1. Rasio modal sendiri terhadap total aktiva | 6 | 10 |
| **Total Bobot** | **50** | **70** |

Penilaian kinerja berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-100/MBU/2002 pasal 3 mengenai penilaian tingkat kesehatan BUMN adalah:

1. Penilaian tingkat kesehatan BUMN digolongkan menjadi:
   * 1. Sehat, yang terdiri dari:

AAA apabila total (TS) lebih besar dari 95

AA apabila 80<TS<-95

A apabila 65<TS<-80

* + 1. Kurang Sehat, yang terdiri dari:

BBB apabila 50-<TS<-65

BB apabila 40<TS<-50

B apabila 30<TS<-40

* + 1. Tidak Sehat, yang terdiri dari:

CCC apabila 20<TS<-30

CC apabila 10<TS<-20

C apabila TS<-10

1. Tingkat Kesehatan BUMN ditetapkan berdasarkan penilaian terhadap kinerja Perusahaan untuk tahun buku yang bersangkutan yang meliputi penilaian :
2. Aspek Keuangan.
3. Aspek Operasional.
4. Aspek Administrasi.
5. Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN sesuai keputusan ini hanya diterapkan bagi BUMN apabila hasil pemeriksaan akuntan terhadap perhitungan keuangan tahunan perusahaan yang bersangkutan dinyatakan dengan kualifikasi "Wajar Tanpa Pengecualian" atau kualifikasi "Wajar Dengan Pengecualian" dari akuntan publik atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.
6. Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN ditetapkan setiap tahun dalam pengesahan laporan tahunan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau Menteri BUMN untuk Perusahaan Umum (PERUM).
   * 1. **Badan Usaha Milik Negara**

**2.1.6.1. Pengertian Badan Usaha Milik Negara**

Di Indonesia sistem perekonomian didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 yang berbunyi:

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan;
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negaradan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara;
3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakana sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Berdasarkan pasal 33 tersebut diketahui bahwa di Indonesia terdapat 3 pelaku ekonomi yaitu swasta, koperasi dan Badan Usaha Milik Negara.

Menurut keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002, BUMN adalah badan usaha mIilik negara yang berbentuk perusahaan (persero) sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan pemerintah No. 12 tahun 1998 dan perusahaan umum (perum) sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan pemerintah No. 13 tahun 1998.

[Pengertian Badan Usaha Milik Negara Secara umum (BUMN)](http://www.artikelsiana.com/)adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan (Berdasarkan UU Republik Indonesia No.19 Tahun 2003). BUMN merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional, disamping badan usaha swasta (BUMS) dan koperasi. BUMN berasal dari kontribusi dalam perekonomian indonesia yang berperan menghasilkan berbagai barang dan jasa guna mewujudkan kesejahteraan rakyat. BUMN terdapat dalam berbagai sektor seperti sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, keuangan, manufaktur, transportasi, pertambangan, listrik, telekomunikasi dan perdagangan serta kontruksi.

**2.1.6.2. Maksud dan Tujuan Pendirian BUMN**

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003 pasal 2, maksud dan tujuan didirikannya BUMN adalah:

1. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;
2. Mengejar keuntungan;
3. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;
4. Merintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;
5. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.
   * + 1. **Jenis-Jenis BUMN**

Dalam UU RI No. 19 Tahun 2003 Mengenai BUMN, BUMN terbagi atas dua jenis yaitu Badan Usaha Persero (perseorangan) dan Badan Usaha Perum (umum).

1. **Perusahaan Perseroan (Persero)**

Pengertian Persero adalah suatu badan usaha yang memiliki bentuk perseroan terbatas, di mana modal sahamnya paling sedikit 51 persen dimiliki oleh Daerah atau Negara. Tujuan persero didirikan ialah untuk mencari keuntungan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat umum. Persero ini dipimpin oleh direksi dan pegawainya berstatus pegawai swasta. Contoh persero : PT Garuda Indonesia, PT Kimia Farma, PT Kereta Api Indonesia, PT Jamsostek dan lain sebagainya.

1. **Perusahaan Umum (Perum)**

Pengertian Perum adalah suatu badan usaha yang dikuasai oleh negara sepenuhnya. Tujuan Perum ini didirikan yaitu untuk mencari keuntungan dan untuk melayani kepentingan masyarakat dengan menyediakan barang dan jasa yang berkualitas dengan harga relatif terjangkau. Perum dipimpin oleh direksi atau direktur dan pekerja perum berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. Perum dapat melakukan penyertaan modal dalam badan usaha lain dengan persetujuan dari menteri BUMN. Contoh perum : Perum pegadaian, Perum Damri, Perum Percetakan Uang, Perum Bulog dan lain sebagainya.

* + 1. **Penelitian Terdahulu**

Beberapa penelitian yang telah dilakukan yang berkaitan dengan analisis kinerja keuangan sebelum dan sesudah privatisasi, yaitu sebagai berikut:

**Table 2.10**

**Persamaan dan Perbedaan Fokus Penelitian**

**Dibandingkan Penelitian Sebelumnya**

| **No.** | **Kriteria** | **Abu Bakar**  **(2010)** | **Dewi Susanti**  **(2013)** | **Yung Sen**  **(2014)** | **Wicak Lingga**  **(2015)** | **Fadil Arsyal**  **(2015)** | **Citra Dianita**  **(2016)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Topik:**   1. Ptivataisasi/Go Public 2. Penilain tingkat kesehatan |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Judul:**   1. Analisis Kinerja Keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pasca privatisasi 2. Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Tingkat Kesehatan pada Perusahaan *Automotive* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Pesiode 2009-2012 3. Analisis Perbedaan Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah *Initial Public Offerring* Pada Perusahaan *Go Public* di Bursa Efek Indonesia 4. Analisis Tingkat Kesehatan Perusahaan dari Aspek Keuangan Menteri BUMN Berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-100/MBU/2002 5. Analisis KInerja Keuangan Sebelum dan Sesudah *Go Public* dengan Menggunakan Metode *Du Point System* (Studi pada Perusahaan Konstruksi BUMN yang Terdaftar di Bursa Efek Indoesia Periode 2004-2014) 6. Analisis Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Privatisassi dan Pengaruhnya Terhadap Penilaian tingkat Kesehatan |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Variabel Independen:**   1. Kinerja Keuangan sebelum privatisasi 2. Kinerja Keuangan sesudah privatisasi 3. ROE 4. ROI 5. Rasio Kas 6. Rasio Lancar 7. *Collections Period* 8. Perputaran Persediaan 9. TATO 10. Total modal sendiri terhadap asset 11. NPM 12. ROA 13. EM 14. *Debt Ratio* 15. Perputaran Piutang 16. Rasio Likuiditas 17. Rasio Solvabilitas 18. Rasio Profitabilitas 19. Rasio Aktivitas   **Variabel Dependen:**   1. Penilaian Tingkat Kesehatan 2. Penilaian Tingkat Kesehatan Berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-100/MBU/2002 3. *Working Capital* 4. *Retairned Earning* 5. EBIT 6. *Book Value of Equity* |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Populasi dan Sampel:**   1. BUMN yang melakukan privatisasi 2001-2007, yaitu PT. Kimi Farma Tbk, PT. Indofarma Tbk, PT. Tambang Batubara Bukit Asam Tbk, PT. Perusahaan Gas Negara Tbk. 2. Perusahaan *Automotive* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2009 – 2012. Jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 12 perusahaan *Automotive*. 3. Perusahaan yang *go public* serta menawarkan saham perdana IPO (*intial public offering*) di tahun 2010 dan menerbitkan laporan keuangan teraudit 2 tahun sebelum IPO (*initial public offering)* 2008-2009 dan 2 tahun sesudah IPO (*initial public offering)* 2011-2012. 4. Laporan Keuangan PT. Adhi Karya (Persero) Tbk periode 2012-2014. 5. perusahaan BUMN *go public* sektor konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2005-2014 dimana terdapat 3 perusahaan konstruksi BUMN yang telah *go public* melalui Bursa Efek Indonesia (BEI) 6. perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), terdapat 16 perusahaan |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | **Metode Penelitian:**   1. Metode Penelitian Analisis Deskriptif Komparatif 2. Uji hipotesis menggunakan metode analisis regresi linier berganda dengan bantuan aplikasi *Statistical Product and Service Solution* (SPSS) 3. Paired Sample t-test berpasangan 4. Penelitian Studi Kasus dengan pendekatan kuantitatif |  |  |  |  |  |  |

Pada Tabel 2.10 dapat dilihat persamaan dan perbedaan fokus penelitian dengan penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil topik privatisasi dan penilaian tingkat kesehatan yang berjudul “Analisis Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Privatisasi dan Pengaruhnya Terhadap Penilaian Tingkat Kesehatan”. Perbedaan penilitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah:

1. Penelitian ini menggunakan dua topik, yaitu privatisasi dan penilian tingkat kesehatan
2. Penelitian ini menggunakan paired simple t-test untuk mengetahui perbedaan kinerja keuangan BUMN sebelum dan sesudah privatisasi
3. Setelah mengetahui perbedaannya, penelitian ini meneliti besarnya pengaruh kinerja keuangan sebelum dan sesudah privatisasi terhadap penilaian tingkat kesehatan.
   1. **Kerangka Pemikiran**

**2.2.1. Pengaruh Imbalan Kepada Pemegang Saham (ROE) Sebelum dan Sesudah Privatisasi Terhadap Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan**

Imbalan Kepada Pemegang Saham atau rasio *Return on Equity* (ROE) sering disebut laba atas *equity*. Menurut Irham Fahmi (2014:137), ROE mengkaji sejauh mana perusahaan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk mampu memberikan laba atas ekuitas. Sedangkan Menurut Syamsuddin (2009:74), ROE merupakan rasio yang menunjukkan tingkat penghasilan atas modal yang diinvestasikan.

ROE merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk menghitung rasio profitabbilitas, rasio profitabilitas menurut Irham Fahmi (2014:135) adalah:

“Rasio ini mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditujukkan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi. Semakin baik rasio profitabilitas maka semakin baik menggambarkan kemampuan tingginya perolehan keuntungan perusahaan”

Menurut definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa ROE berpengaruh terhadap penilaian tingkat kesehatan untuk mengetahui tingkat penghasilan berdasarkan sumber daya yang dimiliki atau modal yang diinvestasikan. Penelitian Fadil Arsyal (2015) menunjukkan ROE mengalaim peningkatan setiap tahunnya.

**2.2.2. Pengaruh Imbalan Investasi (ROI)** **Sebelum dan Sesudah Privatisasi Terhadap Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan**

Imbalan Investasi atau *Return on Investment* (ROI) merupakan salah satu rasio yang digunakan dalam menghitung Rasio Profitabilitas untuk mengetahui tingginya laba yang diperoleh oleh perusahaan. Menurut Irham Fahmi (2014:137), ROI melihat sejauh mana investasi yang telah ditanamkan mampu memberikan pengembalian keuntungan sesuai dengan yang diharapkan. Dan investasi tersebuut sebenarnya sama dengan asset perusahaan yang ditanamkan atau ditempatkan.

Analisa *Return On Invesment (ROI)* dalam analisa keungan mempunyai arti yang sangat penting sebagai salah satu teknik analisa keuangan yang bersifat menyeluruh. Analisa ROI ini sudah merupakaan teknik analisa yang lazim digunakan oleh pemimpinan perusahaan untuk mengukur efektivitas dari keseluruhan operasi perusahaan. *Return On Investment* itu sendiri adalah salah satu bentuk dari rasio profitabilitas yang dimaksudkan untuk dapat mengukur kemampuan perusahaan dengan keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aktiva yang digunakan untuk operasinya perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Dengan demikian ratio ini menghubungkan keuntungan yang diperoleh dari operasinya perusahaan (*net operating income*) dengan jumlah investasi atau aktiva yang digunakan untuk menghasilkan keuntungan operasi tersebut (*net operating assets*). Dengan demikian, ROI berpengaruh terhdap penilaian tingkat kesehatan perusahaan dalam mengukur tingkat laba yag diperoleh terhadap aset yang digunakan.

**2.2.3. Pengaruh Rasio Kas Sebelum dan Sesudah Privatisasi Terhadap Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan**

*Cash ratio* merupakan salah satu ukuran dari rasio likuiditas (*liquidity ratio*). *Cash Ratio* merupakan kemampuan kas dan surat berharga yang dimiliki perusahaan untuk menutup utang lancar, rasio ini paling akurat dalam mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek karena hanya memperhitungkan komponen aktiva lancar yang paling likuid (I Made Sudana, 2015:23-27). Tingkat *cash ratio* yang semakin tinggi menunjukkan kemampuan kas perusahaan untuk memenuhi (membayar) kewajiban jangka pendeknya. *Cash ratio* yang meningkat juga dapat meningkatkan keyakinan para investor untuk membayar dividen yang diharapkan oleh investor. *Cash ratio* merupakan variabel penting yang dipertimbangkan oleh manajemen dalam kebijakan dividen. Perusahaan yang menunjukkan kendala pembayaran (kekurangan likuiditas) mengarahkan manajemen untuk membatasi pertumbuhan dividen.

**2.2.4. Pengaruh Rasio Lancar Sebelum dan Sesudah Privatisasi Terhadap Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan**

Menurut Riyanto (2010: 332), rasio ini merupakan cara untuk mengukur kesanggupan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya, dengan pedoman 2:1 atau 200% ini adalah rasio minimum yang akan dipertahankan oleh suatu perusahaan. Menurut Fahmi (2011:61), kondisi perusahaan yang memiliki *current ratio* yang baik adalah dianggap sebagai perusahaan yang baik dan bagus, namun jika *current ratio* terlalu tinggi juga dianggap tidak baik karena dapat mengindikasikan adanya masalah seperti jumlah persediaan yang relatif tinggi dibandingkan taksiran tingkat penjualan sehingga tingkat perputaran persediaan rendah dan menunjukkan adanya *over investment* dalam persediaan tersebut atau adanya saldo piutang yang besar yang tak tertagih.

Rasio Lancar digunakan untung menghitung Rasio Likuiditas, menurut Harahap (2009:301), rasio likuiditas merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Untuk dapat memenuhi kewajibannya yang sewaktu-waktu ini, maka perusahaan harus mempunyai alat-alat untuk membayar yang berupa aset-aset lancar yang jumlahnya harus jauh lebih besar dari pada kewajiban-kewajiban yang harus segera dibayar berupa kewajiban-kewajiban lancar.

**2.2.5. Pengaruh *Colection Periods* Sebelum dan Sesudah Privatisasi Terhadap Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan**

*Average Collection Period* digunakan untuk mengukur periode rata-rata yang diperlukan untuk mengumpulkan piutang (dalam satuan hari). Jika menghasilkan angka yang semakin kecil menunjukan hasil yang semakin baik. Rasio ini biasanya dipergunakan sebagai tolak ukur untuk menilai tingkat aktivitas aktiva lancar yang berbentuk piutang jangka pendek.

Rasio ini salah satu rasio yang digunakan untuk mengukut Rasio Aktivitas, dengan mengukur Rasio Aktivitas perusahaan dapat dilihat seberapa besar aktivitas perusahaan dalam memanfaatkan sumber dana nya. Semakin efektif dalam memanfaatkan dana, semakin cepat perputaran dana. Menurut Fahmi (2011:132) Rasio aktivitas adalah:

“Rasio yang menggambarkan sejauh mana perusahaan mempergunakan sumber daya perusahaan yang dimilikinya guna menunjang aktivitas perusahaan, dimana penggunaan aktivitas ini sangat maksimal dengan maksud memperoleh hasil yang maksimal.”

Selanjutnya menurut Harmono (2011:234) rasio aktivitas adalah:

“Mengukur tingkat efektivitas perusahaan dalam mengoperasikan aktiva mencakup perputaran piutang, perputaran persediaan dan perputaran total aktiva.”

Dapat disimpulkan bahwa rasio aktivitas digunakan untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan untuk mengetahui seberapa besar efektivitas perusahan dalam memanfaatkan sumber dana nya.

**2.2.6. Pengaruh Perputaran Persediaan** **Sebelum dan Sesudah Privatisasi Terhadap Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan**

Rasio ini merupakan perbandingan antara harga pokok penjualan dengan rata-rata persediaan. Rasio ini menunjukkan berapa cepat perputaran persediaan dalam siklus persediaan normal. Menurut Harahap (2009:308), semakin besar rasio ini semakin baik karena dianggap bahwa kegiatan penjualan berjalan cepat. Menurut Irham Fahmi (2014:132) , Inventory turnover ini melihat sejauh mana tingkat perputaran persediaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Dalam bukunya Irham Fahmi (2014:133) mengutip James C.Van Horne dan John M Wachowocz menyatakan bahwa:

*“Produst costs (inventoriable costs) theat become period expenses only when the products are sold; equals beginning inventory plus cost of good purchased of manufactured minus ending inventory”.*

Perputaran Persediaan atau *Inventory Turnover* merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur Rasio Aktivitas. Menurut Harahap (2009:308), rasio aktivitas menggambarkan aktivitas yang dilakukan perusahaan dalam menjalankan operasinya baik dalam kegiatan penjualan, pembelian, dan kegiatan lainnya. Rasio ini dinyatakan sebagai perbandingan penjualan dengan berbagai elemen aset. Elemen aset sebagai pengguna dana seharusnya bisa dikendalikan agar bisa dimanfaatkan secara optimal. Semakin efektif dalam memanfaatkan dana semakin cepat perputaran dana tersebut, karena rasio aktivitas umunya diukur dari perputaran masing-masing elemen aset.

Menurut Irham Fahmi (2014:133) menyatakan bahwa :

“ Kondisi perusahaan yang baik adalah dimana kepemilikan persediaan dan perputaran adalah selalu berada dalam kondisi yang penumpukkan barang dalam jumlah yang banyak di gudang, namun jika perputaran terlalu tinggi maka jumlah barang yang tersimpan di gudang akan kecil”.

**2.2.7. Pengaruh Perputaran Total Asset Sebelum dan Sesudah Privatisasi Terhadap Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan**

Selain Perputaran Persediaan, Perputaran Total Asset atau *Total Asset Turnover* (TATO) merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengihtung rasio aktivitas. Menurut Irham Fahmi (2014:135), TATO melihat sejauh mana keseluruhan aset yang dimiliki oleh perusahaan terjadi perputaran secara efektif.

Rasio ini merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan penjualan berdasarkan aset yang dimiliki perusahaan. Menurut Harahap (2009:309), semakin besar rasio ini semakin baik karena perusahaan tersebut dianggap efektif dalam mengelola asetnya.

TATO berpengaruh dalam penilaian tingkat kesehatan perusahaan dalam mengukur perputaran aktiva sebagaimana yang diungkapkan Sutrisno (2012:221), TATO adalah:

“Ukuran efektivitas pemanfaatan aktiva dalam menghasilkan penjualan. Semakin besar perputaran aktiva maka semakin efektif perusahaan mengelola aktivanya.”

**2.2.8. Pengaruh Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Aktiva Sebelum dan Sesudah Privatisasi Terhadap Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan**

Rasio ini menunjukkan pentingnya sumber modal dan tingkat keamanan yang dimiliki oleh kreditor. Rasio ini disebut juga *proprietory ratio* yang menunjukkan tingkat solvabilitas perusahaan dengan anggapan bahwa semua aktiva dapat di realisir sesuai dengan yang dilaporkan di neraca. Dalam *Accounting Tools* (2016), dijelaskan bahwa:

*“The proprietary ratio (also known as the*equity ratio*) is the proportion of shareholders' equity to total assets, and as such provides a rough estimate of the* amount *of capitalization currently used to support a business. If the ratio is high, this indicates that a company has a sufficient amount of equity to support the functions of the business, and probably has room in its financial structure to take on additional debt, if necessary. Conversely, a low ratio indicates that a business may be making use of too much debt or trade payables, rather than equity, to support operations (which may place the company at risk of bankruptcy).”*

Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Aktiva merupakan salah satu cara untuk menghitung Rasio Solvabilitas. Menurut Kasmir (2012 : 151) menyatakan bahwa:

“Rasio Solvabilitas atau leverage ratio adalah ratio solvabilitas atau leverage ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya. Dalam arti luas dikatakan bahwa rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek ataupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan (dilikuidasi).”

Sebagaimana diungkapkan oleh Kasmir (2012:153) tujuan perusahaan dalam mengukur rasio solvabilitas yang berpengaruh dalam penilaian kinerja keuangan adalah untuk menganalisis atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan hutang jangka panjang, serta untuk menganalisis berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih ada terdapat sekian kalinya modal sendiri yang dimiliki.

**2.2.9. Pengaruh Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Privatisasi Terhadap Penilaian Tingkat Kesehatan**

Penjelasan umum mengenai Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN pada poin ke 5 adalah :

“Peningkatan efisiensi dan produktifitas BUMN harus dilakukan melalui langkah-langkah restrukturisasi dan privatisasi. Restrukturisasi sektoral dilakukan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif sehingga tercapai efisiensi dan pelayanan yang optimal. Sedangkan restrukturisasi perusahaan yang meliputi penataan kembali bentuk badan usaha, kegiatan usaha, organisasi, manajemen, dan keuangan. Privatisasi bukan semata-mata dimaknai sebagai penjualan perusahaan, melainkan menjadi alat dan cara pembenahan BUMN untuk mencapai beberapa sasaran sekaligus, termasuk didalamnya adalah peningkatan kinerja dan nilai tambah perusahaan, perbaikan struktur keuangan dan manajemen, penciptaan struktur industri yang sehat dan kompetitif, pemberdayaan BUMN yang mampu bersaing dan berorientasi global, penyebaran kepemilikan oleh publik serta pengembangan pasar modal domestik. Dengan dilakukannya privatisasi BUMN, bukan berarti kendali atau kedaulatan negara atas BUMN yang bersangkutan menjadi berkurang atau hilang karena sebagaimana dinyatakan di atas, negara tetap menjalankan fungsi penguasaan melalui regulasi sektoral dimana BUMN yang diprivatisasi melaksanakan kegiatan usahanya.”

Dapat disimpulkan bahwa privatisasi digunakan sebagai alat dan cara pembenahan BUMN untuk meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan, perbaikan struktur keuangan dan manajemen, penciptaan struktur industri yang sehat dan kompetitif, pemberdayaan BUMN yang mampu bersaing dan berorientasi global, penyebaran kepemilikan publik dengan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemilikan saham Persero. Perusahaan yang melakukan privatisasi akan mengalami perubahan besar dalam beberapa kondisi karena melibatkan peran serta masyarakat sehingga kinerja keuangan perusahaan akan di awasi oleh masyarakat. Dengan adanya pengawasan dari masyarakat, perusahaan dituntut untuk bertindak profesional agar investor tidak menarik modalnya dan meninggalkan perusahaan..

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis kinerja keuangan sebelum dan sesudah privatisasi serta pengaruhnya terhadap penilaian tingkat kesehatan BUMN. Setelah melakukan privatisasi maka diharapkan adanya peningkatan terhadap kinerja keuangan. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari rasio keuangan akan semakin membaik.

Berbeda dengan perusahaan swasta, BUMN memiliki pedoman yang mengatur penilaian tingkat kesehatan BUMN yang tertuang dalam Surat Keputusan Menteri BUMN No: Kep-100MBU/2002 tentang penilaian tingkat kesehatan BUMN. Tingkat Kesehatan BUMN ditetapkan berdasarkan penilaian terhadap kinerja perusahaan untuk tahun buku yang bersangkutan yang meliputi penilaian :

1. Aspek Keuangan : Penilaian terhadap aspek keuangan terdiri atas penilaian terhadap delapan rasio yaitu Imbalan kepada pemegang saham (ROE), Imbalan Investasi (ROI), Rasio Kas, Rasio Lancar, Colection Periods, Perputaran persediaan, Perputaran total asset, Rasio modal sendiri terhadap total aktiva.
2. Aspek Operasional : meliputi unsur dari kegiatan-kegiatan yang dianggap dominan dalam menunjang keberhasilan operasional perusahaan sesuai dengan visi dan misi yang dimiliki perusahaan.
3. Aspek Administrasi : Penilaian terhadap aspek administrasi adalah Laporan Perhitungan Tahunan, Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), Laporan Periodik, dan Kinerja Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK).

Menurut Luchdiana (2009:14), Salah satu cara untuk menilai tingkat kesehatan keuangan perusahaan adalah dengan melakukan analisa terhadap laporan keuangan dimasa lalu dan masa sekarang guna kepentingan dimasa yang akan datang dengan perhitungan rasio keuangan. Analisa keuangan juga dilakukan oleh pihak luar perusahaan untuk menentukan potensi penanaman investasi dan penilaian kemungkinan pemberian kredit serta untuk menilai kinerja perusahaan selama ini. Penilaian kondisi kesehatan suatu perusahaan akan banyak membawa dampak dalam pengambilan keputusan, baik bagi pihak investor maupun pihak intern perusahaan itu sendiri. Investor sangat berkepentingan untuk mengetahui kondisi sebenarnya dalam perusahaan, agar dana yang diinvestasikan aman. Sedangkan bagi pihak intern perusahaan penilaian kesehatan perusahaan akan sangat mempengaruhi tujuan strategi perusahaan yang akan dilakukan.

Menurut Fahmi (2011:22), Bagian yang paling dianalisis oleh para investor dalam rangka mengetahui kondisi suatu perusahaan itu sehat atau tidak adalah informasi yang diperoleh dari laporan keuangan yang menggambarkan tentang kondisi keuangan perusahaan seperti diperolehnya informasi tentang tidak likuidnya keuangan perusahaan tersebut, maka ini menunjukkan bahwa perusahaan sudah menunjukkan kecenderungan tidak sehat lagi dan membutuhkan dana untuk membantu mencapai likuiditas kembali.

Berdasarkan kajian pustaka dan tujuan penelitian maka kerangka pemikiran dari penelitian ini dapat dilihat dari gambar 2.1

**BADAN USAHA MILIK NEGARA**

**(BUMN)**

**PRIVATISASI**

**KINERJA KEUANGAN SEBELUM PRIVATISASI**

**KINERJA KEUANGAN SESUDAH PRIVATISASI**

**UJI BEDA**

**PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR KEP-100/MBU/2002**

**Gambar 2.1**

**Kerangka Pemikiran**

* 1. **Hipotesis**

Hipotesis dalam penelitian ini berkaitan dengan ada tidaknya peningkatan pada kinerja keuangan sesudah privatisasi . Berdasarkan tinjauan pustaka, tujuan penelitian, dan kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis yang ditetapkan dalam penilitian ini adalah:

Hipotesis 1 : Terdapat perbedaan kinerja keuangan sebelum dengan sesudah privatisasi

Hipotesis 2 : Terdapat pengaruh Imbalan Kepada Pemegang Saham (ROE)sesudah privatisasi terhadap penilaian tingkat kesehatan perusahaan

Hipotesis 3 : Terdapat pengaruh Imbalan Investasi (ROI) sesudah privatisasi terhadap penilaian tingkat kesehatan perusahaan

Hipotesis 4 : Terdapat pengaruh Rasio Kas sesudah privatisasi terhadap penilaian tingkat kesehatan perusahaan

Hipotesis 5 : Terdapat pengaruh Rasio Lancar sesudah privatisasi terhadap penilaian tingkat kesehatan perusahaan

Hipotesis 6 : Terdapat pengaruh *Colections Periods* sesudah privatisasi terhadap penilaian tingkat kesehatan perusahaan

Hipotesis 7 : Terdapat pengaruh Perputaran Persediaan sesudah privatisasi terhadap penilaian tingkat kesehatan perusahaan

Hipotesis 8 : Terdapat pengaruh Perputaran Total Asset sesudah privatisasi terhadap penilaian tingkat kesehatan perusahaan

Hipotesis 9 : Terdapat pengaruh Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Aktiva sebelum dan sesudah privatisasi terhadap penilaian tingkat kesehatan perusahaan

Hipotesis 10 : Terdapat pengaruh Kinerja Keuangan sesudah privatisasi terhadap penilaian tingkat kesehatan perusahaan